**DIMENSI EKONOMI, TEKNOLOGI, DAN KEAMANAN DALAM INVASI AS KE IRAK**

 ***Harmiyati***

**Pendahuluan**

Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 jam 05.35 waktu Baghdad atau jam 09.35 WIB, selama 21 hari, sejarah dunia kembali mencatat sikap arogan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat (AS) dengan memulai serangan ke Irak tanpa alasan yang jelas dan tanpa dukungan PBB maupun mayoritas masyarakat intemasional. Serangan ini sebelumnya didahului oleh ultimatum George W. Bush kepada Saddam dan keluarganya untuk meninggalkan lrak dalam tempo 48 jam atau menghadapi konsekuensi perang, dan rupanya pilihan terakhir inilah yang diambil Saddam untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya. Langkah tidak populer AS tersebut dilakukan setelah negara adidaya itu menemui jalan buntu di forum Dewan Keamanan PBB, karena terganjal oleh Perancis, Rusia, dan Cina selama berminggu-minggu untuk memaksakan upaya militer guna menyerang lrak. Mengapa AS bersikeras untuk tetap menyerang Irak kendati harus mengesampingkan peran PBB ? Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku AS tersebut, baik dipandang dari dimensi teknologi, keamanan, maupun ekonomi.

**Dimensi Teknologi**

Sebenarnya secara logika, lrak sebagai negara yang kalah perang pasca Perang Teluk II telah demikian tidak berdaya baik secara ekonomi maupun militer. Secara ekonomi, pemerintah Irak yang telah mengalami sanksi embargo yang sudah berjalan selama 12 tahun harus menanggung kesengsaraan yang.luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnlya, pemerintah Irak juga dituntut untuk membayar rampasan perang terhadap Kuwait dan memperbaiki fasilltas-fasilitas perusahaan minyak AS di Kuwait yang hancur akibat invasi Irak ke negeri dinasti Al-Sabah tersebut. Berdasarkan. resolusi DK PBB No. 986 tahun 1995 dan di bawah program *oil for food,* Irak diharuskan membayar 30% hasil penjualan minyaknya untuk dana kompensasi perang.

Demikian pula secara militer, 80% persenjataan Irak sebenarnya telah dihancurkan oleh pasukan koalisi pimpinan AS pada tahun 1991. Penghancuran ini kemudian dilanjutkan oleh tim UNSCOM *(United Nations Special Committee)* yang memperoleh mandat PBB antara tahun 1991-1998 untuk menginspeksi dan menghancurkan senjata pemusnah massal Irak. Catatan UNSCOM mengungkapkan bahwa pada tahun 1998sebanyak 817 dari 819 rudal *Scud* Irak telah dihancurkan. Irak juga telah dilucuti 95% kekuatannya. Sementara itu, Lembaga Internasional untuk Studi Strategis *(lISS* = *International Institute for Strategic Study)* yang berbasis di London dalam laporannya awal September 2002 yang lalu mengakui bahwa akibat Perang Teluk II banyak fasilitas senjata nuklir Irak dihancurkan. Fasilitas itu antara lain : instalasi dan pusat riset nuklir *AI-Thuwaitha,* pabrik pemisahan uranium *AI-Qaim* dan *Al-Jesira,* fasilitas *AI-Tarmiya* dan *AI-Sharqat* yang digunakan untuk memproduksi uranium, dan markas besar *AI- Theerm* untuk mendesain senjata nuklir (Hans C. von Sponeck, 2002: 1-2). Kenyataan·kenyataan ini menunjukkan bahwa Irak memang sudah sangat tidak berdaya secara militer, namun mengapa AS bersikeras untuk tetap menyerang Irak ?

Kemenangan kelompok loyalis Yahudi dalam kabinet Bush lah yang menjadi sumber pendorong *policy* AS yang sangat keras terhadap Irak. Kelompok loyalis atau lebih dikenal sebagai kelompok kanan ini direpresentasikan melalui figur-figur resmi scperti Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Wakil Presiden Dick Cheney, Penasehat Keamanan Nasional Con doleeza Rice, dan Deputi Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz yang pernah menjabat sebagai Dubes AS untuk RI di era tahun 1980-an . Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan P.M. Israel, Ariel Sharon, dan memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keamanan Israel dan menjamin keunggulan Israel atas seluruh bangsa Arab, termasuk di bidang teknologi militer. Kemenangan lobi Yahudi di Senat dan Konggres AS untuk memaksakan *policy* AS terhadap Irak, bahkan telah tercapai sejak Operasi Badai Gurun *(Operation Desert Storm)* pada perang Teluk II. Seperti diketahui, operasi tersebut yang tujuan utamanya memaksa lrak keluar dari Kuwait sesuai mandat resolusi PBB No.660, ternyata telah melenceng jauh dengan menghancurkan pusat-pusat industri yang dicurigai sebagai tempat pembuatan senjata kimia, nuklir, dan biologi Irak. Operasi ini sekaligus merupakan momentum bagi Israel untuk mempertahankan 'supremasi" teknologi militemya dalam pertarungan melawan Irak sebagai musuh strategis dan potensial utama di dunia Arab. Kekhawatiran Israel terhadap ancaman Irak memang terasa berlebihan setelah Irak berhasil membangun teknologi persenjataan militer secara besar-besaran di awal 1980-an sampai 1990. Kemajuan teknologi yang dicapai Irak, sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1959 ketika Baghdad mendirikan Komite Energi Nuklir lrak *(Iraqi Nuclear Energy Committee).* Pada tahun yang sama, Irak bergabung dalam Badan Tenaga Atom Internasional *(lAEA* = *lnternational Atomic Energy Association).* Sepuluh tahun kemudian, pada 29 Oktober 1969, pemerintah Irak menandatangani Perjanjian Larangan Pengembangan Nuklir *(NPT* = *The Nuclear Non-Proliferation Treaty),* dan tiga tahun kemudian meratifikasinya. Pada tahun 1960, jauh sebelum Saddam berkuasa, Irak menjalin kerjasama dengan Uni Soviet (Rusia sekarang) untuk membangun riset reaktor nuklir di Al-Tuwaitha, sebuah kota di selatan Baghdad, yang pernbangunannya dimulai sejak 1963 dan selesai pada tahun 1968 (Adel Darwish, 1991: 115). Reaktor nuklir yang hanya berkekuatan 5 Mega Watt ini, pada tahun *1975 diupgrade* menjadi 40 MW dengan melibatkan Perancis.

Pada permulaan tahun 1976, Irak menandatangani perjanjian dengan Italia mengenai suplai perlengkapan dan teknologi nuklir, termasuk daur ulang bahan bakar nuklir dan pemrosesan kembali bahan bakar radiasi *(****Ibid****).* Pada tahun berikutnya, dengan bantuan Perancis, pemerintah Irak berhasil membangun reaktor nuklir, yang dikenal dengan proyek *Osirak,* tetapi kemudian didesain sebagai proyek *Tammuz I7*. Kedua reaktor ini adalah *Tammuz I* yang berkekuatan. 50 MW dan *Tammuz II* yang berkekuatan jauh lebih kecil, hanya 1 MW. *Tammuz I* menggunakan bahan baker uranium yang diperkaya *(enriched uranium)* dan mampu mernproduksi plutonium (Pu-239) 10 kg per tahun (untuk membuat satu senjata nuklir diperlukan kira-kira 6 kg plutonium). Pada bulan Juli 1980, Perancis rnengapalkan 12 kg dari total kebutuhan 80 kg uranium (U-235) ke Irak. Reaktor Tamnuz I mernbutuhkan tiga muatan dari 12 kg U-235 per tahun, sementara Tammuz II hanya membutuhkon satu muatan dari 12 kg U-235.

Pada era 1980-an tersebut, Irak bukan hanya berhasil membangun reaktor nuklir, tetapi juga teknologi rudal serta mampu mengembangkan senjata kimia dan biologi. Pengembangan teknologi rudal Irak berlangsung sejak tahun 1984 dengan bantuan konstruksi dan teknologi dari perusahaan raksasa Jerman, *Messerschmitt-Bolkow-B/ohm* (MBB), yang pembangunannya mencapai kesempurnaan pada tahun 1989 dengan berdlrinya Pusat Riset dan Pengembangan Rudal dan Senjata Kimia yang terkenal dengmi nama *Saad* 16, dan berlokasi di sebelah utara kota Mosul, Irak Utara. Perlengkapan Saad 16 ini disuplai dari negara·:ncgara Barat. Pada tahun 1986, perusahaan *Hwellet Packard,* di bawah lisensi pemerintah AS, mengapalkan peralatan komputer senilai I juta dollar AS ke pusat riset tersebut. Hal serupa diikuti oleh perusahaan *Tektronix* dan *Wi/tron.* Keterlibatan perusahaan Jerman yang lain bagi kepentingan Saad 16 adalah Fritz Warner Armament Industries, Karl Kolb, Voest, Carl Zeiss of Baden Wurttemburg, dan Degussa of Stuttgart. Sementara, Inggris menyediakan konsultan teknik senior di bidang aerodinamika *(Ibid,* p.93).

Kemajuan teknologi rudal lrak mencapai prestasi tinggi dengan keberhasilan para insinyur 1rak melakukan modifikasi atas rudal *Scud-B* buatan Uni Soviet dalam berbagai daya jelajah. Dengan bantuan para teknisi Mesir, Irak berhasil mdakukan modifikasi melalui pengurangan ukuran muatan kepala nuklir dari 1000 kg menjadi 500 kg dan meningkatkan jangkauannya dari 300 km menjadi 600 km. Rudal modifikasi yang terkenal sebagai *A/­Hussein* ini telah teruji kemampuannya uniuk menghancurkan kota Teheran dalam Perang Teluk 1. Dari 360 buah rudal yang digunakan 1rak dalam konflik Perang Teluk I, sebanyak 200 buah telah dipakai untuk menekan Iran antara Februari-April 1988, sehingga secara psikologis berhasil memaksa Teheran untuk menerima gencatan senjata pada bulan Juli 1988. Perlu dicatat, bahwa rudal yang dipakai Irak untuk memerangi Pemerintah Iran, bukan hanya *A/­Hussein,* tetapi juga *Badr-2000* yang dibeli dari Mesir. Rudal yang terakhir ini merupakan hasil modifikasi *Scud-Bs* dengan pengurangan muatan sampai 27 5 kg dan bcrjangkau 600 km. Disamping untuk menghajar Iran, rudal *A/-Hussein* juga digunakan dalam Perang Teluk II

untuk menghajar Tel Aviv, Haifa, dan Jerusalem di Israel.

Selama tahun 1988, lrak juga berhasil memodifikasi rudal *Scud-B* menjadi *A/-Abbas* dengan muatan nuklir 300 kg dan jangkauan 900 km. Kemampuan rudal *A/-Abbas* telah teruji dalam Perang Teluk II untuk menghajar kota Riyadh, Dahran, dan AI-Khobar di Arab Saudi, sebagai kota-kota pangkalan militer AS. Pada Desember 1989, Irak mencatat prestasi gemilang dengan menempatkan satelit Tammuz-1 buatan sendiri yang diluncurkan dari pusat antariksa *AI·Anbar.* Satelit tcrsebut diluncurkan dengan menggunakan roket ballistic *AI-Abeed* yang mampu membawa hulu ledak 750kg dan berdaya jelajah 2000 km. Perkembangan lebih jauh dicapai pada bulan November 1990, ketika Irak berhasil melakukan uji coba rudal ballistik yang lain *(AI-Hijarat)* di wilayah Gurun Mauritania, yang mampu mencapai jarak 1200 km. Dalam Perang Teluk II, rudal *AI-Hijarat* ini digunakan untuk menghajar pusat reaktor nuklir Israel, Dimona, di gurun Negev.

 Kemajuan teknologi satelit dan rudal Irak ini, diiringi dengan keberhasilan mengembangkan senjata kimia dan biologi yang dirintis sejak tahun 1974. Pembangunan senjata pemusnah massaI ini sejak semula dimaksudkan untuk mencapai paritas militer dengan Israel dan memberikan kemampuan *detterent* terhadap negara Yahudi tersebut. Dalam penggunaannya, senjata tersebut pernah diujicobakan dalam perang Teluk 1 melawan Iran dalam pertempuran di Panjivan (Iran) tahun 1983 dan terhadap rakyatnya sendiri (etnis Kurdi) pada 16 Maret 1988 di kota Halabjah. Iraq juga berkali-kali mengancam .Is:ael untuk membumihanguskan separoh wilayah Israel dengan rudal berhulu ledak kimia, seperti yang diperingatkan Saddam terhadap Israel pada 2 April 1990 : " *I swear to* God, *we will let our fire eat up half of Israel,if* *it tries to do anything againts Iraq, we do not need an atomic bomb, because we have binary chemicals* "(Donald Neff, 1991: 16).

Kemampuan penguasaan teknologi militer Irak inilah yang telah membawa kepanikan pihak Israel. Seperti diketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-­negara Arab selalu mendapat perhatian se:rius dari Israel dan AS, yang tidak rela melihat terjadinya perubahan perimbangan kekuatan yang menguntungkan pihak Arab. Untuk itu, Israel selalu menggunakan segala cara untuk menghalang-halangi bahkan menghancurkan kemajuan-kemajuan yang dicapai negara-negara Arab. Dalam kasus Irak ini, Israel sejak awal berusaha memonitor untuk kemudian mematahkannya. Pada awal pembangunan proyek *Tammuz* 17, Israel memprotes dukungan yang diberikan Perancis terhadap Baghdad. Melalui sandi *Operasi Sphinx,* agen-agen rahasia Israel, *Massad.* mclakukan penyusupan ke pusat riset nuklir dan berusaha memperoleh data informasi akurat tentang kemajuan Tammuz 17. Aksi­-aksi *Mossad* ini, berlanjut pada 4 juli 1979 dengan melakukan pengrusakan terhadap bagian­-bagian reaktor senilai 23 juta dollar AS di sebuah perusahaan di La Seinesur-Mer, dekat Toulon Perancis (Richard Wilson, 1991: 10). Bagian-bagian reaktor tersebut semula akan dikirimkan ke irak.

Agen-agen *Mossad* juga berusaha membunuh para pakar yang ikut mengembangkan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi militer lrak. Pada I4 Juni 1980, seorang insinyur kelahiran Mesir y,mg bekerja pada reaktor *Tammuz,* Dr. Yahia El Meshad, dibunuh di kamar hotelnya di Paris. Pada bulan Juni 1981, Dr. Salman,\_seorang anggota senior pada Komisi Tenaga Atom Irak yang sedang melakukan penelitian kerja sama di CERN, Swiss, ditemukan meninggal karena penyakit *paralisis* (keracunan makanan). Pada tanggal 22 Maret 1990, Gerald Vincent Bull, seorang ahli artileri Kanada, mati tertembak di luar apartemennya di Brussel, Belgia, setelah dipublikasikan memiliki hubungan dengan program persenjataan lrak. Kurang dari seminggu kemudian, empat warga Irak dan seorang *Warga* Perancis ditahan di Inggris karena dituduh menyelundupkan *krytron,* semacam alat picu nuklir, yang akan dibawa ke 1rak.

Kegiatan perusakan paling parah yang dilakukan Israel adalah ketika negara Yahudi itu melakukan aksi-aksi penghancuran terhadap reaktor Tammuz-I yang baru saja selesai dibangun. Pada waktu itu, tanggal 7 Juni 1981, dengan menggunakan sandi *Operasi Baby/on*, 8 buah Jet tempur F-15 *Eagle* & 8 buah jet tempur F-16 *Fighting Fa/con* tinggal landas secara rahasia dari bandara Etzion, menuju Al-Thuwaitha, dengan memakan waktu 2,5 jam, untuk menghancurkan fasilitas nuklir *Tammuz-l (Osirak)* yang merupakan simbol pencapaian teknologi paling *pregtigious* dari rezim Partai Baath, yang bukan hanya mampu dibanggakan pada rakyat Iraq, namun juga di lingkungan dunia Arab secara luas. Masing-masing pesawat Israel tersebut menjatuhkan 2 buah *high- explosive bombs* yang berkekuatan 2 x 975 kg (Urnar A. Jenie, 1992:1). Hanya dalam tempo 2 menit *Operasi Baby/on* berjalan lancar tanpa gangguan sedikitpun.

Pemboman oleh Israel itu telah rnengakibatkan reaksi keras dari masyarakat internasional yang tertuang dalam bentuk resolusi DK PBB No *487* tanggal 10 Juni 1981 yang intinya:

1. Mengutuk keras aksi-aksi penyerangan Israel sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB.

2. Meminta Israel untuk tidak rnengulangi perilakunya tersebut.

 3. Menyerukanbahwa penyerangan tersebut merupakan ancaman terhadap IAEA NPT

4.Mengakui hak seluruh bangsa untuk mengejar pengembangan nuklir untuk perdamaian.

5. Meminta Israel untuk menyerahkan fasilitas-£asilitas nakhr kepada perlindungan IAEA

6. Menyerukan bahwa Irak berhak untuk mendapat ganti kerugian.

Sekalipun demikian, tidak satupun point-point dalam resolusi tersebut dilaksanakan olch Israel. Perdana Menteri Menachem Begin pada waktu itu bahkan berkeyakinan sambil mempropagandakan opini bahwa terdapat sebuah ruang rahasia. untuk memisahkan plutonium dan membuat bam di bawah Reaktor Osirak. Tetapi kesaksian Dr. Richard Wilson, seorang fisikawan nuklir dari Universitas Harvard AS, yang sempat berkunjung ke reaktor Osirak pada tahun 1982 telah mengesampingkan tuduhan-tuduhan P.M. Israel tersebut. Menurut Wilson, setelah masuk ke ruang bawah, dia tidak menemukan. ruang rahasia seperti yang dituduhkan Begin. Bahkan sebaIiknya, seperti pernah dikemukakan oleh Mordechai Vanunu, seorang pakar nuklir yang pernah bekerja pada Reaktor Dimona milik Israel, kepada surat kabar *London Sunday Times* pada 5 Oktober 1986 menjelaskan bahwa di Dimona terdapat laboratorium enam lantai yang digunakan untuk membuat. bom nuklir. Wilson juga memperingatkan fisikawan penasehat P.M. Begin, Yuuval Neeman, untuk mampu membedakan kondisi Reaktor Osirak dengan Reaktor Dimond.

Dalam analisis Wilson, reaktor nuklir Osirak berbeda dengan reaktor nuklir Dimona. Reaktor Osirak yang dibeli dari Perancis dan memiliki kekuatan 70 MW ini, hanya menggunakan air biasa *(light water)* sebagai moderatornya, dan hanya memiliki sedikit cadang netron *(neutron spare),* sehingga kesempatan untuk digunakan memproduksi plutonium semakin kecil. Di samping itu, reaktor Osirak menggunakan bahan bakar uranium yang sangat diperkaya *(very high enriched uranium* ), sehingga kadar U-238nya kecil dan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat diubah me1njadi plutonium (Pu-239) oleh sinar netron. Sebaliknya, berdasarkan keterangan Vanunu, reaktor Dimona rnerniliki kekuatan awal 50 MW yang kemudian ditingkatkan menjadi 150 MW. Bahan bakar uranium kasar disuplai secara rahasia dari Afrika Selatan, sedangkan muatan uranium yang diperkaya (*enriched uranium)* atau U-235 didapat dengan mencuri dari fasilitas-fasilitas nuklir di AS. Menurut Wilson, setidaknya bila reaktor nuklir Dimona ini telah beroperasi 50%, waktu itu tahun 1991, maka ia alcan dapat memproduksi plutonium yang dapat dipakai untuk membuat 300 bom nuklir.

Tetapi, analisis Wilson tentang kemampuan nuklir Israel tersebut mungkm masih di bawah perkiraan, karena Israel sendiri, sebagaimana Perancis, Cina, india, Pakistan, dan, Afrika. Selatan, bukanlah negara penandatangan NPT, sehingga fasllitas nuklirnya tidak bisa diperiksa oleh IAEA Kasus yang menimpa lrak menunjukkan, bahwa negara penandatangan NPT pun sesungguhnya tidak aman dari rongrongan negara bukan penandatangan NPT. Padahal sesuai aturan, negara penandatangan NPT seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman yang tidak dikehendaki.

Barangkali inilah ironi dari organisasi NPT, yang sejak awal pembentukannya tidak menunjukkan tingkat kesederajatan dalam keanggotaannya. Sejak dibentuk tahun 1968, Perjanjian Larangan Pengembangbiakan Nuklir bersifat diskriminatif dari awalnya. Negara-­negara besar pemilik bom nuklir (AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina) dapat memiliki akses bebas dalam teknologi nuklir. Bahkan, Perancis dan Cina sempat urung untuk menandatangani perjanjian sampai sekarang. Sementara 137 negara lainnya harus bersedia rnenyerahkan fasilitas nuklirnya agar dapat diperiksa oleh lAEA untuk menentukan apakah Negara-negara yang bersangkutan mengembangkan nuklir untuk kegiatan yang tidak merusak. Sekali lagi, sungguh ironis, bahwa sejak penandatanganan NPT, banyak negara-negara di dunia yang telah mengembangkan bom nuklir tanpa dapat dipantau oleh IAEA seperti Israel di atas. Rongrongan Israel untuk terus melumpuhkan kemampuan teknologi Irak yang didukung oleh pemerintah AS saat ini boleh dikata merupakan kemenangan gemilang negara Yahudi tersebut atas bangsa Arab. Hilangnya kendala dan musuh potensial Arab ini akan memuluskan jalan bagi kedua negara, Israel dan AS, untuk semakin memperluas hegemoninya di Timur Tengah.

**Dimensi Keamanan**

Perilaku militeristik AS di Timur Tengah dewasa ini, khususnya di Irak, sebenamya tidak lepas dan agenda Doktrin Ofensif baru AS yang dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih pada tanggal 17 September 2002 yang lalu. Doktrin yang digunakan sebagai pembenaran teoritis dan politis militerisme AS itu telah menjadi petunjuk bagi kebijakan AS menyerang pihak-pihak yang dianggap bisa mengancam kepentingan AS. Dalam hal ini, Presiden Bush memberi kriteria bahwa pihak-pihak tersebut adalah kelompok teroris, para pemerintah tiran, dan negara-negara tertentu pemilik senjata pemusnah massal. Doktrin Keamanan ini meliputi tujuh elemen, yakni :

1. Amerika harus mempertahankan dunia yang unipolar dan mencegah munculnya kompetitor baru di Eropa dan Asia.

2. Pengakuan bahwa terorisme merupakan ancaman baru, sehingga perlu dimusnahkan.

1. Menyatakan bahwa konsep pencegahan, kedaulatan, dan perimbangan kekuatan sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perlu strategi baru, bahwa untuk bisa aman tidak ada pilihan lain kecuali menyerang. Oleh karena itu, menurut Doktrin Ofensif ini, penggunaan kekuatan perlu dilakukan lebih dulu (perlunya *pre-emptive* strike) untuk meneegah mereka yang digolongkan sebagai ancaman potensial berubah menjadi persoalan besar.
2. AS harus melakukan pembongkaran dan penyusunan kedaulatan baru (perlunya pemaknaan ulang arti kedaulatan), sehingga AS dapat melakukan intervensi kemana­-mana setiap saat guna menghancurkan ancaman.
3. Strategi baru ini merupakan depresiasi umum terhadap aturan-aturan dan perjanjian-­perjanjian internasional serta kemitraan keamanan internasional.

6. AS memainkan peran secara langsung dan leluasa dalam menjawab ancaman-ancaman.

7 . Dengan strategi baru ini AS perlu pula menilai ulang mengenai stabilitas internasional.

Dalam kasus Irak, melalui Doktrin Ofensif tersebut AS dengan mudah mampu menjatuhkan stigma kepada Saddam Hussein sebagai pemilik senjata pemusnah massal. Apalagi, upaya penggulingan Saddam telah dirancang secara sistematis pasca Perang Teluk II tahun IJ91 *(Kompas,* 2003:5). Pada waktu itu, Paul Wolfowitz (seorang tokoh Yahudi AS) yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk Perencanaan Kebijakan AS mengajukan sebuah konsep tentang Doktrin Pertahanan Baru AS yang dikenal sebagai *Defence Planning Guidance for /994 -1999.* Dalam konsepnya itu ia mengusulkan tiga hal :

1. Untuk menjaga ketertiban baru dunia, AS perlu mencegah munculnya rival baru
2. Agar AS menggunakan doktrin *pre-emptive strike* (serangan dini) tanpa harus tergantung pada kekuatan koalisi dcngan negara-negara lain.
3. Perlunya serangan militer ke Irak untuk mencegah jatuhnya senjata pemusnah massal ke tangan teroris.

Dalam perkembangan selanjutnya, Wolfowitz dan para kelompok kanan lainnya merancang *Project for the New American Century* (PNAC) tahun 1997. Melalui proyek ini, mereka sempat mengusulkan kepada mantan Presiden Bill Clinton tentang perlunya mcnyingkirkan Presiden Saddam Hussein, dengan catatan bahwa upaya itu akan berjalan lambat , kecuali terdapat malapetaka besar seperti "Pearl Harbour baru" (Foreign Affairs, 1999:24-41) . Usulan kelompok Wolfowitz ini mendapatkan 'momentumnya dalam kahinet Bush saat ini karena dukungan penuh dari tokoh-tokoh kunci seperti Mentcri Pertahanan Donald Rumsfeld dan Wakil Presiden Dick Cheney. Usulan "Pearl Harbour baru" yang terealisasi dalam bentuk tragedi WTC 11 September 2001 telah menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan Doktrin Keamanan AS bukan hanya di Irak, tetapi juga secara luas di berbagai kawasan dunia ini.

**Dimensi Ekonomi**

Disamping alasan-alasan di atas, alasan lain yang dapat menjeIaskan ambisi besar AS mengagresi lrak adalah keinginan AS untuk menguasai minyak kawasan Teluk, khususnya Irak. Potensi minyak Irak menduduki ranking keempat setelah Arab Saudi dan produksinya nomor tiga setelah Iran *(lihat tabel* 1). Sementara dari data terakhir, Irak diperkirakan memiliki cadangan minyak mentah sekitar 112 milyar barrel, dan diprediksi masih memiliki deposit minyak lain sebesar 220 milyar barrel serta deposit gas, alam sebesar 110 juta kaki kubik *(Kampas,* 2002: 3). Dengan kekayaan minyak dan gas sebanyak itu, Irak memiliki posisi kuat secara geopolitik dan geoekonomi di wilayah Teluk.

**Tabel 1**

**Cadangan dan Produksi Minyak Dunia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** |  **Nama Wilayah/negara** | **Jaminan Cadangan****(Juta Barrel)** | **Andil Total** | **Produksi****(barrel/hari)** | **Andil Total****(%)** |
| 1 | TimTeng dan Afrika Utara | 433.200 | 61,5 | 14.875 | 25,7 |
| 2 | Aljazair | 9000 | 1,3 | 990 | 1,5 |
| 3 | Abu Dhabi | 30.500 | 4,3 | 840 | 1,4 |
| 4 | Dubai | 1.400 | 0,2 | 365 | 0,6 |
| 5 | Mesir | 3200 | 0,5 | 915 | 1,6 |
| 6 | Iran | 48.500 | 6,9 | 2.195 | 3,9 |
| 7 | iraq | 44.500 | 6,3 | 1.170 | 2,0 |
| 8 | Kuwait | 90.000 | 12,7 | 985 | 1,7 |
| 9 | Libya | 21.100 | 3,0 | 1.115 | 1,9 |
| 10 | Zona Netral | 5400 | 0,8 | 420 | 0,8 |
| 11 | Oman | 3500 | 0,5 | 420 | 0,8 |
| 12 | Qatar | 3400 | 0,5 | 425 | 0,7 |
| 13 | Saudi Arabia | 169.000 | 23,9 | 4.690 | 8,1 |
| 14 | Lain-lain | 3700 | 0,5 | 345 | 0,6 |
| 15 | Amerika Utara | 42.800 | 6,1 | 11.940 | 20,1 |
| 16 | Amerika Latin | 83.300 | 11,8 | 6.705 | 11,9 |
| 17 | Eropa Barat | 24.700 | 3,5 | 3800 | 6,5 |
| 18 | Afrika Sub Sahara | 20.800 | 3,0 | 2054 | 3,7 |
| 19 | Asia/Pasifik | 18.600 | 2,5 | 3320 | 5,8 |
| 20 | Blok Timur/Cina | 83.800 | 1,8 | 15.115 | 26,5 |
|  | **Total**  | 707.200 | 100,0 | 57.800 |  |

*Sumber:* Alasdair Drysdale, "Oilfields and Pipelines", *The Cambridge Atlas of The 'Middle East and North Africa.* p.66

Di sisi lain, ketergantungan AS akan minyak semakin meningkat. Berdasarkan *T'he National Energy Policy Report* AS yang diumumkan Gedung Putih pada Mei 2001, ketergantungan minyak dari Teluk telah mencapai setengah dari total konsumsi AS, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan ketergantungan ini akan mencapai dua pertiga dari seluruh konsumsi minyak AS. Sementara cadangan minyak AS sendiri hanya di bawah 50 juta barrel dengan produksi mencapai 19,7 ribu barrel perhari dan dipastikan akan cepat habis. Oleh karena itu, sesuai kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, AS harus memperoleh strategi yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk menopang kepentingannya itu.

Dalam konteks Irak, kendala terbesar untuk merealisasikem kepentingan tersebut adalah terletak pada pribadi Saddam yang dikenal sangat anti terhadap hegemoni AS (dan juga Israel). Oleh karena itu, menyingkirkan Saddam Hussein dari tampuk kekuasaan Irak adalah kebutuhan AS paling *urgen.* Gedung Putih pun segera menyusun rancangan untuk mendiskreditkan Saddam di forum intemasional melalui tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, dengan harapan suatu saat dapat mengambil alih kendali minyak Irak. Lebih-lebih, diketahui bahwa *inner cyrcle* dari kabinet Bush terkenal sebagai milyuner yang sangat terkait dengan bisnis minyak. Figur-figur itu adalah George W. Bush sendiri dengan perusahaanlnya Arabusto dan Harken, Dick Cheney yang pernah menjabat sebagai *chief executive* di Haliburton, sebuah perusahaan minyak yang juga merupakan salah satu perusahaan besar di dunia sebagai penghasil alat-alat berat pertambangan. Sementara, Menteri Perdagangan Donald Evans rnemiliki saham antara 5-25 juta dollar AS di Tom Brown Inc., yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas. Sedang Penasihat Keamanan Nasional Condoleeza Rice dikabarkan pernah menjabat sebagai direktur Chevron (sebelumnya bernama Standard Oil of California atau SOCAL, pecahan dari Standard Oil yang dimiliki oleh John D. Rockefeller).

Untuk memperlancar jalan penguasaan minyak Irak ini, pemerintah AS telah mempersiapkan pemerintahan oposisi pengganti Saddam yang akan mengurusi masalah perminyakan. Kalangan oposisi di bawah payung *Iraqi National Kongres (/NC)* bahkan menjamin akan meninjau kembali semua kesepakatan bisnis yang telah dijalin oleh sejumlah negara dengan pemerintahan Saddam. "Kami akan meninjau semua perjanjian yang ada", kata insinyur perminyakan yang memirnpin Kongres Nasional Irak di London, Faisal Qaragholi *(Kompas,2002:3).*

Namun, obsesi AS untuk menikmati *bonanza* minyak Irak masih terbentur oleh kendala yang lain, yakni kepentingan negara-negara besar seperti Perancis, Rusia, dan Jerman yang tidak menyukai dominasi AS dalam bisnis minyak di Irak. Negara-negara tersebut telah menjalin kerjasama bisnis minyak Irak sejak program *oil for food* diberlakukan.. Di tengah-­tengah . penerapan sanksi embargo ekonomi terhadap Irak, mereka bahkan berhasil meningkatkan kontrak-kontrak dagang yang menggiurkan dengan menandatangani. sejumlah MOU dengan Irak, yang realisasinya akan terwujud segera setelah sanksi embargo ekonomi dicabut. Sebaliknya, maksud lain dari pendekatan Irak terhadap negara-negara besar anggota DK PBB (Perancis, Rusia, dan Cina) itu tidak lain adalah mengupayakan dukungan bagi pencabutan sanksi. Rusia, dalam hal ini, telah menandatangani kerja sama bisnis minyak, energi listrik, dan jalan kereta api senilai US$ 40 milyar dengan Irak pada pertengahan Agustus 2002 yang lalu. Perusahaan minyak Rusia yang telah membuka cabangnya di Irak adalah *LukOil.* Terhadap Rusia, Irak memiliki hutang sebesar 16 milyar dollar AS pasca perang Teluk II. Oleh karena itu, dalam kerjasama tersebut diharapkan hutang-hutang Irak dapat terhapus.

Demikian pula dengan Perancis. Perusahaan-perusahaan minyak Perancis seperti *Elf Aquitaina* dan *Total* adalah perusahaan Barat pertama yang membuat kontrak bisnis dengan. lrak pasca Perang Teluk Il. Pemerintah Irak bahkan mengusulkan suatu monopoli produksi bagi perusahaan tersebut dalam mengembangkan ladang-ladang minyak di kepulauan Majnoun dan Nahr Ummar yang dapat memproduksi minyak sebesar satu juta barrel perhari. Sebagai gantinya, pemerintah Irak meminta Perancis aktifmelakukan lobi bagi pencabutan sanksi-sanksi PBB. Terhadap Perancis, Irak terlibat hutang sebesar 8,7 milyar dollar AS (**Cordesman, 1997 :205**). Sementara negara-negara lain yang telah mengikat kontrak kerjasama bisnis dengan Irak adalah Jernan, Spanyol, Italia, Belanda, Portugal, Cina dan masih banyak lagi yang lain. Mayoritas mereka khawatir jika Saddam tergusur nanti, perusahaan minyak AS akan mendominasi dan mereka akan tersingkir, kendati pemerintah AS sudah berulang kali berusaha meyakinkan mereka untuk memberikan jaminan keuntungan jika mereka bersedia membantu penggulingan Saddam. Sekalipun demikian, pihak negara-negara non-Amerika tetap bersikap skeptis akan prospek bisnisnya di Irak, apalagi dengan adanya pemyataan pemimpin *INC* Ahmed Chalabi, yang berterus terang akan lebih berpihak pada konsorsium pimpinan AS untuk mengembangkan perminyakan Irak. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan AS seperti Exxon Mobil Oil, Chevron, St.andard Oil, dsb. akan memainkan peranan besar .

Fenomena kekhawatiran negara-negara non-Amerika ini agaknya kian terbukti pasca invasi AS ke Irak 20 Maret lalu, yang ditunjukkan dengan adanya persiapan Bush yang telah menunjuk lima perusahaan minyak AS untuk merekonstruksi Irak pasca perang. Lima perusahaan pemenang tender itu adalah Kellog Brown and Root dari Halliburton Co. di Houston; Bechtel Group dari San Francisco; Fluor dari Aliso Viejo, California; Louis Berger Group dari East Orange, New Jersey dan Parsons Corp. dari Pasadena, California. Perusahaan Halliburton bahkan menerima kontrak pemadaman ladang-Iadang minyak Irak yang terbakar tanpa harus melalui proses tender. Pemerintah AS, dalam hal ini, telah menyediakan biaya talangan untuk program rekonstruksi Irak sebesar 1,7 milyar dollar, dengan harapan biaya itu bisa kcmbali setelah AS berhasil mengontrol industri minyak Irak pasca invasi. Sementara sejumlah perusahaan minyak non-Amerika, oleh pihak Pentagon, telah direncanakan untuk masuk dalam daftar *blacklist,* yang termasuk di dalamnya adalah Shell dari Inggris, Total dari Perancis, dan ENI dari Italia. Selain itu, AS juga berusaha mernbatasi peran PBB dalam rekonstruksi Irak pasca perang, dan menuntut peran lebih hanya di pihak koalisi AS. Sikap AS yang demikian ini telah mengakibatkan penolakan Inggris sebagai sekutu satu-satunya selama ini yang tetap bersikeras mengusulkan dominasi peran PBB pasca perang.

**Penutup**

Dari penjelasan dan uraian di atas, terlihat bahwa faktor teknologi-keamanan-ekonomi telah bertali-temali dalam mewujudkan kebijakan politik luar negeri AS di Irak. Dalam hal ini, AS terkesan terlalu mencari-cari alasan untuk menyerang Irak, sebab hingga babak terakhir invasinya, yang ditandai dengan raibnya Saddam beserta sekitar 60 ribu pasukan elitnya serta tiadanya perlawanan ketika pasukan koalisi memasuki ibu kota Baghdad pada hari Rabu 9 April lalu, AS ternyata tidak mlampu membuktikan adanya senjata pemusnab massal Irak. Dengan demikian, pergeseran skenario AS dari tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal ke penggulingan rezim yang sah di Irak, semakin meyakinkan masyarakat dunia bahwa memang ada *grand strategy* yang telah disiapkan secara matang oleh pihak Washington untuk menguasai minyak Irak disamping kepentingan untuk meliudungi sekutu abadinya Israe1. Tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, dalam. hal ini, hanya dijadikan dalih bagi kepentingan jangka pendek AS di Irak. Sementara kepentingan pemenuhan kebutuhan energi AS dan upaya memenangkan supremasi politik-militer Israel dalam hubungan konflik Arab-lsrael merupakan kepentingan jangka panjang yang harus diperjuangkannya secara terus menerus.

Satu pelajaran berharga yang dapat ditarik dari pengalaman invasi AS ke Irak ini adalah bahwa pemaksaan kehendak melalui kekuatan militer semata-mata ternyata tidak cukup untuk menundukkan pihak lain agar mematuhi kemauan imperialistik Suatu negara super power. Penggunaan kekuatan militer secara ilegal dan unilateral bukan hanya telah mengusik sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga merusak tatanan hukum internasional dan mengacaukan keamanan dunia. PBB sebagai organisasi supranasional pun semakin kehilangan kredibilitas karena tidak mampu mencegah agresitivas AS. Perilaku politik-militer AS yang demikian, jika tidak segera dihentikan, akan menjadi *presedence* buruk bagi pihak-pihak yang dianggap tidak kompromistis terhadap kepentingan AS bukan hanya di wilayah Timur Tengah, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan satu suara dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi PBB untuk mendesak AS menghentikan perilaku militeristiknya, sambil mengingatkan bahwa kampanye antiterorisme AS yang selama ini didengung-dengungkan pasca tragedi WTC akan semakin kehilangan dukungan masyarakat internasional karena mereka mulai memiliki kesan bahwa ternyata AS adalah teroris terbesar dunia.

**Daftar Pustaka**

Cordesman, Anthony, H. and Ahmad S. Hashim, *Iraq : Sanction and Beyond,* Westview Press, United Kingdom, 1997.

Darwis, Adel, and Gregory Alexander, *Unholly Babylon, The Secret History of Saddam’s War,* Victor Gollanz Ltd., London, 1991.

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Cambridge Atlas of The Middle East and North Africa*, Cambridge University Press, London, 1987.

Jenie, Umar A. *Kasus Perburuan Nuklir Irak*, makalah seminar pada Pusat Penelitian Masalah-Masalah Timur Tengah (PPMTT) Fisipol UGM, 19-11-1992.

Neff, Donald, “The US, Iraq, Israel, and Iran : Backdrop to War”, *Journal of Palestine Studies*, Vol.XX, No.4, Summer, 1991.

Von Sponeck, Hans C., *Iraq : Four Questions, Four Answers*, makalah seminar pada Pertemuan Eropa, Brussels, 25 September, 2002.

Wilson, Richard, “Nuclear Proliferation and The Case of Iraq”, *Journal of Palestine Studies*, Vol. XX, Spring, 1991.

*Kompas*, 24 November 2002

\_\_\_\_\_\_\_, 22 Maret 2003